



BUPATI KEDIRI
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45/345/418.08/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada dibawahnya;
- c. bahwa sesuai Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 065/045/418.09/2017 perihal Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal 17 Pebruari 2017 Nomor 065/510/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. memperoleh pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dimanfaatkan sebagai dasar untuk :
- a. Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Strategis SKPD;
 - b. Perencanaan Tahunan;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 065/045/418.09/2017 perihal Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal 17 Pebruari 2017 Nomor 065/510/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017, dengan hasil peserta rapat memutuskan menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 - 08 - 2017

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

H. SUKADI, S.E, M.M.

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

- Tujuan : 1. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelayanan.
- Tugas Pokok : Melaksanakan pedoman umum dan teknis, kebijakan pembentukan, tata laksana, pengembangan kapasitas, penerapan dan pengendalian, penyediaan dan pengelolaan data base, monitoring, serta pedoman umum analisa jabatan perangkat daerah.
- Fungsi : a. Pelaksanaan perumusan kebijakan bidang organisasi;
b. Penyusunan perencanaan program bidang organisasi;
c. Pelaksanaan penyusunan kelembagaan dan analisa jabatan;
d. Pelaksanaan penyusunan akuntabilitas dan pemberdayaan aparatur;
e. Pelaksanaan penyusunan tata laksana dan pelayanan publik;
f. Perumusan pembinaan pendayagunaan aparatur negara; dan
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang organisasi.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGU NGJAWAB
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah disertai budaya kerja	1. Persentase SAKIP SKPD yang berpredikat B	$\frac{\text{SAKIP SKPD berpredikat B}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Bagian Organisasi
		2. Persentase SKPD yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK)	$\frac{\text{SKPD yang memiliki KBK}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta kesesuaian standar kompetensi manajerial	1. Persentase kelembagaan SKPD yang tepat sesuai peraturan yang berlaku	$\frac{\text{Kelembagaan SKPD yang telah dibentuk sesuai peraturan yang berlaku}}{\text{Jumlah SKPD yang seharusnya dibentuk sesuai peraturan yang berlaku}} \times 100\%$	
		2. Persentase SKPD yang telah dilakukan Anjab dan ABK	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang dilakukan Anjab}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	
		3. Persentase SKPD yang telah disusun Standar Kompetensi Manajerial	$\frac{\text{Jumlah SKPD telah disusun SKM}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	
3.	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	1. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang ketatalaksanaan	$\frac{\text{Peraturan ketatalaksanaan yang telah disusun dan diterapkan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah peraturan ketatalaksanaan yang seharusnya disusun sesuai peraturan yang berlaku}} \times 100\%$	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	
		2. Persentase SKPD yang telah menyusun Standart Operasional Prosedure (SOP)	$\frac{\text{SKPD yang menyusun SOP}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Bagian Organisasi	
		3. Persentase SKPD yang mendapatkan nilai IKM kriteria baik	$\frac{\text{Capaian IKM SKPD yang membidangi pelayanan dengan nilai baik}}{\text{Jumlah SKPD yang membidangi pelayanan}} \times 100\%$		
		4. Persentase SKPD yang telah menyusun laporan capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang telah menyusun capaian SPM}}{\text{Jumlah SKPD yang seharusnya menyusun capaian SPM sesuai peraturan yang berlaku}} \times 100\%$		

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


H. SUKADI, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006